

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

TUGAS : BADAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MEMPUNYAI TUGAS POKOK MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

FUNGSI : UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH MEMPUNYAI FUNGSI :

- A) PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DALAM BIDANG KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN UMUM YANG DITETAPKAN OLEH WALIKOTA;
- B) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN;
- C) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN;
- D) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTANSI;
- E) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI;
- F) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN / PENGELOLAAN ASET DAERAH;
- G) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENETAPAN;
- H) PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL, PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PENGAWASAN;
- I) PENGELOLAAN URUSAN KESEKRETARIATAN.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	ME NI	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL	<p>FORMULASI PERHITUNGAN :</p> $\frac{\text{JUMLAH SKPD YANG MENYERAHKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU} \times 100\%}{\text{JUMLAH SKPD YANG MENYERAHKAN LAPORAN KEUANGAN}}$ $\frac{\text{JUMLAH ASET SKPD YANG TERCATAT DALAM KIB SKPD} \times 100\%}{\text{JUMLAH ASET PEMKO}}$ <p>PENJELASAN : KETENTUAN DIATUR DI DALAM PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD DI ATUR DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.</p>	BIDANG AKUNTANSI BAKEUDA KOTA	BADAN KEUANGAN
2.	MENINGKATNYA DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN DAERAH	RASIO DERAJAT DESENTRALISASI RASIO KEMANDIRIAN DAERAH	<p>BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANJARMASIN</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN :</p> $\frac{\text{JUMLAH REALISASI PAD}}{\text{TOTAL REALISASI PENDAPATAN DAERAH}} \times 100\%$ $\frac{\text{JUMLAH REALISASI PAD}}{(\text{TOTAL REALISASI TRANSFER PUSAT} + \text{TRANSFER PROVINSI} + \text{TRANSFER PINJAMAN})} \times 100\%$	BIDANG PERBENDAHARAAN BAKEUDA KOTA BANJARMASIN	BADAN KEUANGAN DAERAH
			<p>PENJELASAN : BERDASARKAN KRITERIA DARI KEMENDAGRI UNTUK TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL, RASIO KEMANDIRIAN ADALAH</p> <p>0-10 = SANGAT KURANG 10-20 = KURANG 20-30 = SEDANG 30,01-40 = CUKUP 40,01-50 = BAIK > 50 = SANGAT BAIK</p>		

Banjarmasin, Agustus 2019
Kepala Badan,



H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710421 199803 1 009